

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perencanaan wilayah, konsep pusat pelayanan (*central place*) pertama kali dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1933. Teori ini menjelaskan terbentuknya hirarki kota berdasarkan kemampuan suatu tempat dalam menyediakan barang dan jasa bagi penduduk di sekitarnya, dengan mempertimbangkan jangkauan dan ambang batas penduduk (L. S. Pratama et al., 2024). Pusat Pelayanan merupakan elemen penting dalam struktur ruang wilayah yang berfungsi sebagai simpul kegiatan masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan umum, seperti pelayanan administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan jasa (Chen, 2023). Keberadaan pusat pelayanan yang terencana dapat mendukung pemerataan akses pelayanan, efisiensi penyediaan fasilitas, serta pengendalian perkembangan wilayah (Sharma & Patil, 2024).

Hirarki perkotaan mencerminkan tingkat fungsi perkotaan yang timbul akibat variasi dalam jumlah, jenis, dan kualitas fasilitas yang ada di suatu kota (Haryani et al., 2025). Perbedaan fungsi ini umumnya terkait erat dengan ukuran kota dan mencerminkan perbedaan luas wilayah. Namun dalam kenyataannya, banyak kabupaten/kota di Indonesia masih menghadapi ketimpangan dalam distribusi pusat pelayanan. Konsentrasi kegiatan dan fasilitas umumnya terfokus di kawasan pusat kota, sehingga menciptakan beban berlebihan pada wilayah tertentu dan memperluas kesenjangan antarwilayah, sementara daerah pinggiran sering mengalami kekurangan fasilitas atau akses yang terbatas terhadap layanan dasar (Faqih et al., 2026).

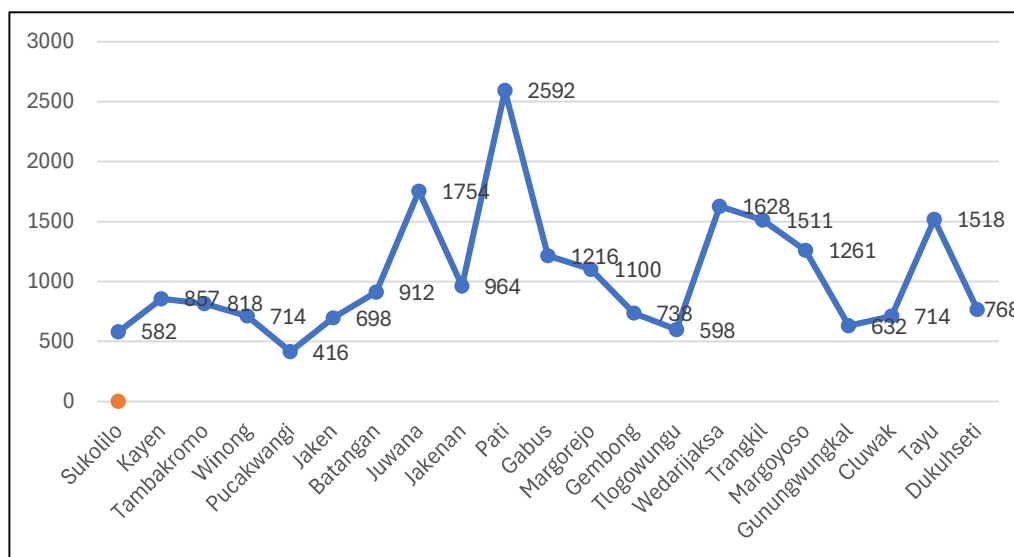
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman beserta sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat melalui hubungan yang bersifat hirarkis dan fungsional. Struktur ruang berperan sebagai pengarah perkembangan wilayah yang dipengaruhi oleh persebaran penduduk, ketersediaan infrastruktur, serta keberadaan pusat-pusat kegiatan masyarakat. Dinamika aktivitas sosial yang terus berkembang menyebabkan kebutuhan ruang pada wilayah perkotaan semakin meningkat. Kondisi tersebut sejalan dengan fenomena urbanisasi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk perkotaan serta perubahan pola penggunaan lahan akibat perpindahan dan pemusatan aktivitas masyarakat di kawasan perkotaan (Schiavina et al., 2022). Pertumbuhan penduduk perkotaan yang pesat menuntut penyediaan fasilitas dan

layanan publik yang memadai, yang meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, perdagangan dan jasa, serta sistem transportasi (Fan et al., 2022).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, Kabupaten Pati termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) JEKUTI yang diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa. Selain pengembangan sektor ekonomi tersebut, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga mengarahkan penguatan kawasan perkotaan di WP JEKUTI yang meliputi Kawasan Perkotaan Jepara, Kawasan Perkotaan Kudus, serta Kawasan Perkotaan Pati dan Juwana. Arah tersebut menunjukkan bahwa Kawasan Perkotaan Pati dan Kawasan Perkotaan Juwana diarahkan sebagai pusat pertumbuhan di dalam Kabupaten Pati sehingga memerlukan arahan sistem pelayanan yang memadai agar mampu mengakomodasi perkembangan aktivitas penduduk dan kegiatan ekonomi. Arahan pengembangan tersebut selaras dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Pati, yaitu mewujudkan Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani berbasis keunggulan pertanian dan industri berkelanjutan. Hal tersebut didukung dengan kondisi eksisting penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Pati yang didominasi oleh kegiatan pertanian. Berdasarkan Kabupaten Pati Dalam Angka (2025), luas lahan sawah yang ada di Kabupaten Pati mencapai 58 ribu hektar, sehingga Pati menjadi salah satu lumbung pangan Jawa Tengah. Selain itu, Kabupaten Pati juga merupakan sentra perikanan tangkap dan budidaya yang didukung oleh keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di beberapa kecamatan seperti Juwana dan Dukuhseti (Listiana & Suwandono, 2021). Potensi sektor unggulan tersebut mendorong berkembangnya aktivitas produksi, distribusi, perdagangan, dan jasa yang mampu memerlukan sistem pusat pelayanan yang menghubungkan berbagai kegiatan ekonomi dan kawasan permukiman.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 menjelaskan bahwa Sistem Pusat Pelayanan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik memiliki fungsi strategis, yang terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 1.503,68 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,3 juta jiwa yang tersebar pada 21 kecamatan (Badan Pusat Statistik, 2025). Kondisi ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan umum yang mudah dijangkau dan tersebar secara

proporsional. Semakin besar jumlah penduduk di suatu kawasan, semakin kompleks pula kebutuhan layanan yang harus dipenuhi (Rian Nugraha et al., 2024). Hal ini mendorong munculnya konsentrasi berbagai sarana seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, perkantoran, hingga fasilitas ekonomi (Haryani et al., 2025). Ketika fasilitas-fasilitas tersebut berkumpul pada titik tertentu, suatu kawasan akan berkembang menjadi pusat aktivitas yang menarik penduduk dari wilayah sekitarnya. Pergerakan ini memunculkan pola keruangan yang sering menunjukkan adanya ketimpangan akses antarwilayah (Nauli, 2023).



Sumber: Kabupaten Pati Dalam Angka 2026

Gambar 1. 1 Kepadatan Pendudukan Per Kecamatan Kabupaten Pati 2025 km²/jiwa

Dilihat dari data kepadatan penduduk Kabupaten Pati tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan jumlah penduduk yang cukup besar pada setiap kecamatan. Kecamatan Pati memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 2.592 jiwa/km². Kepadatan penduduk yang relatif tinggi juga terdapat di Kecamatan Juwana (1.754 jiwa/km²), Wedarijaksa (1.628 jiwa/km²), Tayu (1.518 jiwa/km²), dan Trangkil (1.511 jiwa/km²). Kecamatan Pucakwangi menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk terendah sebesar 416 jiwa/km², diikuti Batangan (582 jiwa/km²), Gunungwungkal (632 jiwa/km²), Jaken (698 jiwa/km²), dan Cluwak (714 jiwa/km²). Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Pati masih terkonsentrasi pada beberapa wilayah perkotaan. Kecamatan Pati sebagai ibu kota kabupaten menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan berbagai aktivitas ekonomi sehingga mampu menarik penduduk yang lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya. Juwana, Wedarijaksa, Trangkil, dan Tayu juga berkembang sebagai kawasan dengan aktivitas pelayanan yang cukup tinggi sehingga kepadatan penduduknya berada di atas sebagian besar kecamatan lain. Kondisi tersebut

menunjukkan adanya keterkaitan antara perkembangan kegiatan perkotaan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di suatu wilayah (Hidayat & Setiowati, 2022). Ketimpangan kepadatan penduduk ini berkaitan dengan ketimpangan ketersediaan fasilitas pelayanan antarkecamatan. Kondisi ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan umum yang mudah dijangkau. Semakin besar jumlah penduduk di suatu kawasan, semakin kompleks pula kebutuhan layanan yang harus dipenuhi (Rian Nugraha et al., 2024).

Selain ketimpangan jumlah dan kepadatan penduduk, Kabupaten Pati juga masih menghadapi disparitas pembangunan antarwilayah yang ditunjukkan oleh adanya perbedaan tingkat perkembangan antara kawasan perkotaan dan kawasan pinggiran. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), kawasan pinggiran barat (Kecamatan Gembong dan sekitarnya) Kabupaten Pati memiliki nilai IDM terendah sebesar 67,27, diikuti kawasan pinggiran selatan (Kecamatan Sukolilo dan sekitarnya) sebesar 68,20, kawasan pinggiran timur (Kecamatan Jaken dan sekitarnya) sebesar 69,42, dan kawasan pinggiran utara (Kecamatan Dukuhseti dan sekitarnya) sebesar 71,06, sedangkan kawasan perkotaan (Kecamatan Pati dan sekitarnya) memiliki capaian pembangunan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 77,20 (Suroso, 2023). Data tersebut mengindikasikan masih adanya kesenjangan tingkat pembangunan dan adanya ketimpangan pelayanan yang masih terkonsentrasi pada kawasan tertentu terutama kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Pati.

Ketimpangan pelayanan dipengaruhi oleh perbedaan tingkat perkembangan wilayah, jumlah penduduk, aksesibilitas, dan konsentrasi kegiatan ekonomi (Adryawning & Widiyanto, 2025). Wilayah yang berada pada pusat perkotaan memiliki fasilitas pelayanan yang lebih lengkap sehingga dapat berkembang cepat dibandingkan dengan wilayah pinggiran (Suroso, 2023). Ketimpangan tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti rendahnya akses masyarakat terhadap layanan dasar, meningkatnya biaya dan waktu tempuh untuk memperoleh pelayanan, serta terjadinya pemusatan aktivitas pada wilayah tertentu (Iscahyono et al., 2024). Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka akan memicu ketidakseimbangan perkembangan wilayah dan menurunkan efektivitas pelayanan publik dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Analisis pusat pelayanan dapat digunakan untuk mendorong perkembangan Kabupaten Pati, sehingga terjadi pemerataan pelayanan pada berbagai wilayah Kabupaten Pati. Penetapan pusat pelayanan dilakukan untuk mengoptimalkan distribusi fasilitas dan

aktivitas pelayanan masyarakat agar lebih efektif, efisien, dan mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata (Paramuditaningtyas & Destiawan, 2021). Keberadaan pusat pelayanan juga berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan wilayah melalui dukungan fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, transportasi, dan pelayanan publik lainnya yang saling terintegrasi. Dengan adanya penentuan pusat pelayanan yang tepat dapat mengurangi kesenjangan perkembangan antarkecamatan serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai fasilitas pelayanan dasar (Rian Nugraha et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Pati. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan arahan pengembangan pusat pelayanan guna mendukung pemerataan pembangunan wilayah dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis kawasan perkotaan untuk mengidentifikasi karakteristik dan perkembangan wilayah perkotaan, analisis skalogram untuk mengetahui hirarki pusat pelayanan berdasarkan kelengkapan fasilitas pada masing-masing kecamatan, serta analisis *kernel density* untuk menganalisis pola persebaran dan tingkat konsentrasi fasilitas pelayanan di Kabupaten Pati (Jumiyanti et al., 2026). Melalui pendekatan tersebut dapat diketahui pusat-pusat pelayanan yang berpotensi berkembang, wilayah yang masih mengalami keterbatasan pelayanan, serta arahan pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkelanjutan (A. D. Pratama & Ciptawaty, 2022).

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menetapkan pusat-pusat pelayanan yang tepat dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Pati, mengingat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari 1.349.172 jiwa pada tahun 2021 menjadi 1.381.912 jiwa pada tahun 2025 belum diimbangi dengan pemerataan distribusi fasilitas pelayanan antarkecamatan. Ketimpangan tersebut tercermin dari masih terkonsentrasinya kegiatan dan fasilitas di kecamatan-kecamatan tertentu seperti Kecamatan Pati, Juwana, dan Tayu, sementara kecamatan-kecamatan lain di wilayah selatan dan pinggiran masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, diperlukan analisis terkait pusat-pusat pelayanan dan arahan perkembangannya untuk mengurangi kesenjangan pelayanan dan diketahui juga pusat-pusat pelayanan yang berpotensi berkembang.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi pusat pelayanan di Kabupaten Pati guna menyesuaikan kembali arah pengembangan wilayah dengan kebutuhan aktual. Penelitian ini memiliki sasaran untuk:

1. Mengidentifikasi dan menentukan kawasan perkotaan di Kabupaten Pati
2. Menentukan hirarki menggunakan analisis skalogram yang mencerminkan tingkat pelayanan, fungsi, dan peran masing-masing kecamatan atau pusat pelayanan.
3. Menentukan pola persebaran dan tingkat konsentrasi fasilitas pelayanan di Kabupaten Pati menggunakan analisis *kernel density*.
4. Menentukan pusat-pusat pelayanan untuk menentukan fungsi pelayanan masing-masing kawasan perkotaan di Kabupaten Pati.
5. Menentukan arahan pengembangan pusat pelayanan Kabupaten Pati.

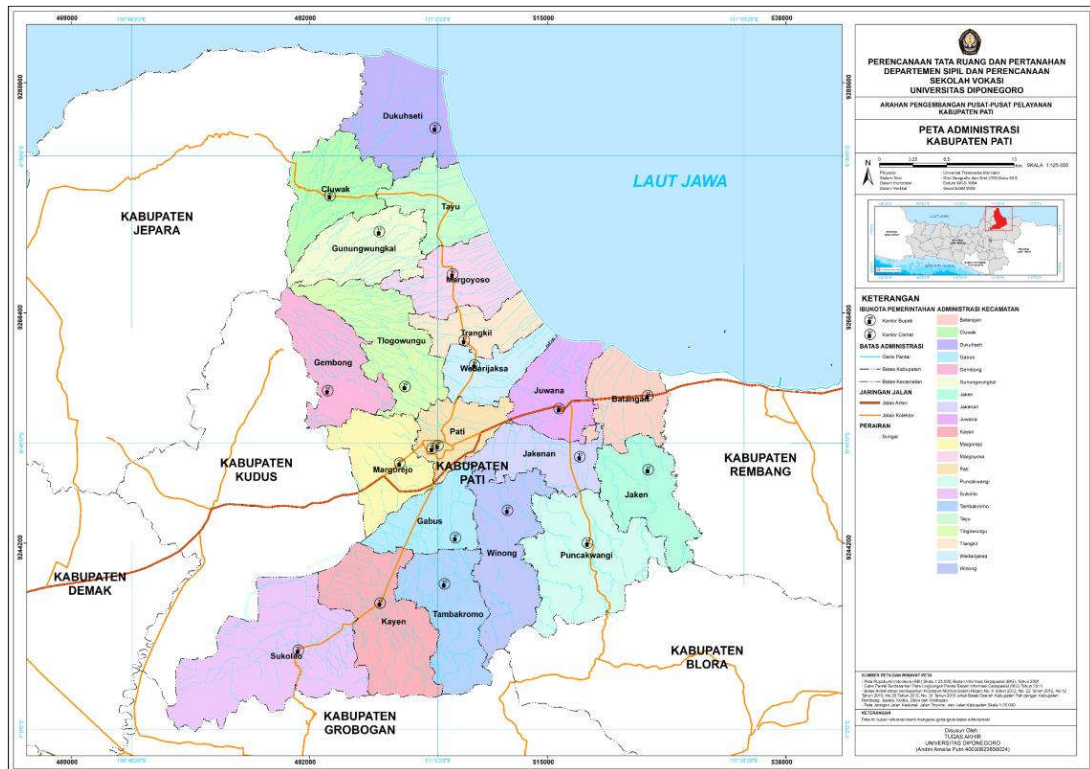
1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kabupaten Pati merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian timur laut provinsi dan memiliki posisi strategis sebagai wilayah penghubung antara jalur pantura bagian timur dengan kawasan selatan. Luas wilayah Kabupaten Pati mencapai $\pm 1.503,68 \text{ km}^2$ yang terbagi menjadi 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan. Kondisi geografis Kabupaten Pati didominasi oleh dataran rendah di bagian utara serta perbukitan kapur di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan Pegunungan Kendeng.

Secara administratif, Kabupaten Pati memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
3. Sebelah Barat : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
4. Sebelah Timur : Kabupaten Rembang



Sumber: Hasil Olah Data Penulis, 2026

Gambar 1. 2 Peta Administrasi Kabupaten Pati

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang akan dibahas pada penyusunan tugas akhir ini melingkupi materi sebagai berikut.

1. Analisis Deliniasi Kawasan Perkotaan

Penelitian ini berfokus pada proses identifikasi wilayah perkotaan dengan menggunakan data GHSL serta acuan Peraturan Kepala BPS Nomor 120 Tahun 2020, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai desa mana yang tergolong perkotaan maupun perdesaan di Kabupaten Pati.

2. Analisis Skalogram

Penelitian ini juga berfokus pada penentuan hirarki wilayah melalui analisis skalogram, yang digunakan untuk menilai tingkat kelengkapan fasilitas serta peran relatif setiap kecamatan dalam struktur pelayanan.

3. Analisis *Kernel Density*

Analisis menggunakan metode *kernel density* untuk melihat pola konsentrasi fasilitas Umum.

4. Analisis Pusat-Pusat Pelayanan

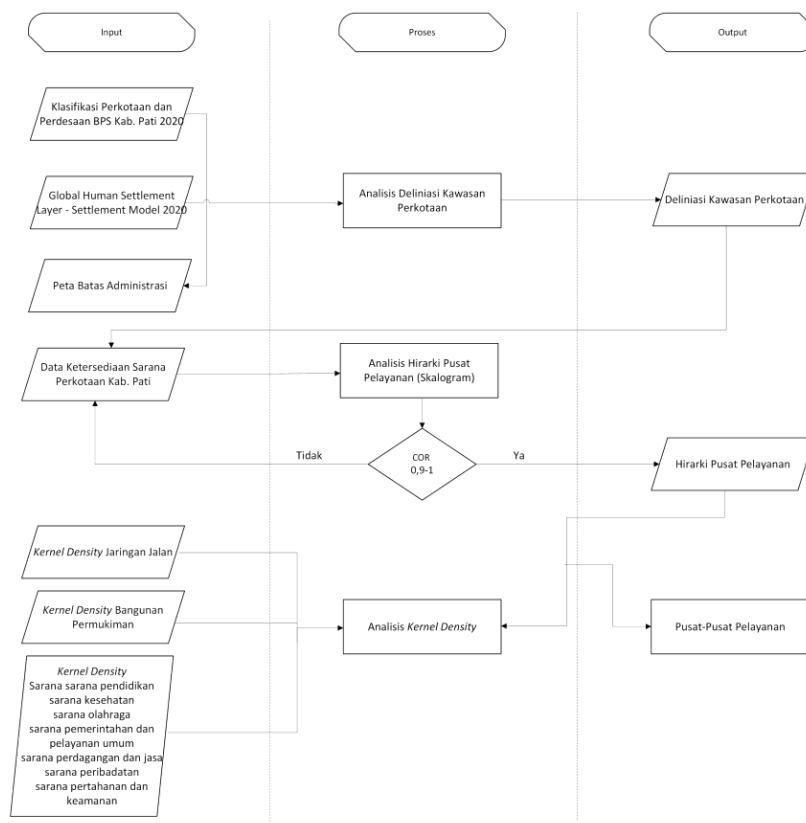
Analisis pusat pelayanan digunakan untuk menentukan fungsi pelayanan masing-masing wilayah di Kabupaten Pati.

5. Arahan Pengembangan Pusat Pelayanan

Arahan pengembangan pusat pelayanan ditentukan berdasarkan hasil dari analisis deliniasi kawasan perkotaan, penentuan hirarki pusat pelayanan, dan analisis penentuan pusat pelayanan.

1.5 Tahapan/Proses

Tahapan pelaksanaan ini berisi urutan dan penjelasan kegiatan apa saja yang dilakukan dari persiapan-pengumpulan data-analisis-hingga output yang dihasilkan.



Sumber: Hasil Analisis, 2026

Gambar 1. 3 Tahapan/Proses Pelaksanaan

1. Persiapan

Tahapan persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh proses penelitian tersusun secara sistematis sebelum masuk ke tahap pengumpulan data ataupun analisis data. Pada tahap ini perlu dilakukan perumusan fenomena, permasalahan, serta identifikasi awal terhadap wilayah yang dipilih sebagai lokasi penelitian agar proses pemetaan cakupan wilayah dapat dilakukan secara tepat. Selain itu, perlu dilakukan literatur terkait peraturan dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas yaitu penentuan pusat pelayanan.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui kegiatan observasi lapangan terkait sarana di Kabupaten Pati. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari telaah dokumen dan permohonan data instansi berupa batas administrasi, data Global Human Settlement Layer – Settlement Model (GHS-SMOD) 2020, klasifikasi perkotaan dan perdesaan BPS Tahun 2020, data keberadaan sarana pelayanan Umum, serta dokumen RTRW Kabupaten Pati.

3. Pengolahan dan Analisis

Pada tahapan pengolahan data dan analisis dilakukan untuk memproses data yang telah didapatkan mencari sebuah analisis system pusat pelayanan. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif dengan alat bantu analisis skalogram dan *kernel density*.

1.6 Metode dan Hasil Akhir

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sebuah tahapan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian untuk melakukan analisis data. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder melalui telaah dokumen dan permohonan data instansi-instansi terkait. Permohonan data diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten pati. Sementara itu, data telaah dokumen didapatkan melalui dokumen perencanaan maupun melalui *website*.

Tabel 1. 1 Tabel Kebutuhan Data

Sasaran	Nama Data	Jenis Data	Bentuk Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data	Tahun
Analisis Deliniasi Kawasan Perkotaan	Data Klasifikasi Desa Kota	Sekunder	Tabel	Telaah Dokumen	BPS	2020
	Data GHSL	Sekunder	Raster	Telaah Dokumen	Geo Copernicus	2020
	Batas Administrasi	Sekunder	Shapefile	Telaah Dokumen	DPUPR	2012
Analisis Skalogram	Data Ketersediaan Sarana	Sekunder	Tabel	Permohonan Data	DPUPR	2025
Analisis Kernel Density	Persebaran Sarana	Sekunder	Shapefile	Permohonan Data	DPUPR	2025
	Bangunan Permukiman	Sekunder	Shapefile	Permohonan Data	DPUPR	2025

Sasaran	Nama Data	Jenis Data	Bentuk Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data	Tahun
	Jaringan Jalan	Sekunder	Shapefile	Permohonan Data	DPUPR	2025

Sumber : Hasil Analisis, 2025

1.6.3 Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis yang akan dilakukan berupa.

a. Analisis Deliniasi Perkotaan

- 1) Melakukan identifikasi desa/kelurahan yang masuk kedalam kawasan perkotaan berdasarkan data klasifikasi perkotaan dan perdesaan BPS Tahun 2020.
- 2) Melakukan identifikasi Kawasan perkotaan berdasarkan data GHSL/*GHS-SMOD* tahun 2020
- 3) Melakukan overlay data klasifikasi desa kota BPS tahun 2020 dengan data GHSL.

b. Skalogram

Teknik analisis skalogram digunakan untuk menentukan hirarki pusat pelayanan berdasarkan ketersediaan fasilitas yang ada. Fasilitas yang digunakan merupakan sarana penciri perkotaan. Pada umumnya analisis skalogram dalam menentukan hirarki pusat kegiatan mengacu pada ketersediaan fasilitas dan jumlah fasilitas. Dalam format ketersediaan fasilitas (ada/tidaknya fasilitas) dengan memberikan notari angka “1” untuk ketersediaan dan angka “0” untuk ketidakterediaan fasilitas (Burhanuddin et al., 2022). Tahap berikutnya dengan menjumlahkan semua ketersediaan fasilitas secara vertikal dan horizontal kemudian mengurutkan jumlah terbanyak sampai dengan jumlah terkecil. Data ketersediaan sarana yang telah didapatkan dilakukan perhitungan error dilakukan dengan menggunakan rumus *Coefficient of Reproducibility* (COR) sebagai berikut:

$$COR = 1 - \frac{\sum e}{N \times K}$$

Keterangan:

e : Jumlah eror

N : Jumlah subjek/daerah, serta

K : Jumlah obyek/fasilitas

Setelah melakukan error hasil koefisien dianggap layak jika memiliki nilai akhir sebesar 0,9-1. Kemudian setelah menghitung nilai error selanjutnya menentukan orde menggunakan rumus $1 + 3,3 (\log n)$. Dimana (n) merupakan jumlah daerah yang dilakukan perhitungan.

c. *Kernel Density*

- 1) Melakukan analisis *kernel density* menggunakan *software ArcGis* untuk melakukan kernel density jaringan jalan.
- 2) Melakukan analisis *kernel density* menggunakan *software ArcGis* untuk melakukan kernel density bangunan permukiman yang diubah terlebih dahulu kedalam bentuk *point*.
- 3) Melakukan analisis *kernel density* menggunakan *software ArcGis* untuk melakukan kernel density persebaran titik sarana.
- 4) Melakukan overlay dari ketiga hasil kernel density jaringan jalan, bangunan permukiman, dan sarana.

d. Penentuan Pusat Pelayanan

Penentuan pusat pelayanan dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis skelogram dan kernel density. Analisis skelogram digunakan untuk menentukan hirarki kawasan perkotaan berdasarkan kelengkapan fasilitas pelayanan, sedangkan analisis kernel density menggambarkan tingkat konsentrasi aktivitas spasial melalui kepadatan jaringan jalan, bangunan permukiman, dan sarana pelayanan yang telah dioverlay. Hasil kedua analisis tersebut kemudian diintegrasikan untuk menentukan pusat pelayanan berdasarkan tingkat hirarki dan konsentrasi aktivitas pada masing-masing kawasan perkotaan.